

PATEN

PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

Edisi Ketiga 2024



KOPERASI

MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI MIKRO DAN KECIL



KoperasiPemberdaya

ATAS NAMA EKOSISTEM KOPERASI YANG SEHAT

Dunia sedang dihadapkan pada tantangan yang menerpa silih berganti dari ancaman krisis hingga ketidakpastian yang menjadi keniscayaan.

Namun ekonomi Indonesia tetap membuktikan diri sebagai salah satu yang tertangguh kendati pada kuartal III tahun 2023 mengalami perlambatan, tapi ekonomi masih tumbuh 4,9% YoY.

Ini tidak lepas dari peran dan resiliensi koperasi sebagai tulang punggung perekonomian bangsa ini. Koperasi telah menjelma menjadi ekosistem usaha yang mewadahi usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan bisnisnya.

Maka di usia ke-77 tahun, koperasi Indonesia mendapatkan momentum untuk memperkuat perannya sebagai ekosistem usaha bagi UMKM sekaligus menghubungkan industri hulu hilir yang memungkinkan pelaku usaha naik kelas, berkelanjutan, dan sejahtera.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan sejumlah fondasi besar untuk hal itu, mencakup perluasan akses pembiayaan, perluasan pasar dan digital, kemitraan strategis, pendataan, dan reformasi birokrasi.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah mempercepat perubahan regulasi yang menjadi payung hukum perkoperasian Indonesia. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi telah berumur lebih dari tiga dekade menjadikannya tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Sejatinya sejumlah regulasi yang terbit juga turut mendukung berkembangnya koperasi di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan itu memungkinkan perizinan yang lebih sederhana, meminimalkan tumpang tindih regulasi, membuka akses pembiayaan, *on boarding* digital, perlindungan hukum, dan berbagai insentif lainnya.

Di samping upaya lain yang juga terus dilakukan untuk menumbuhkan ekosistem sehat bagi koperasi.

Tak kalah penting hal yang dibutuhkan koperasi di Indonesia saat ini adalah membangun citra baik dan semangat optimisme. Dua hal inilah yang akan menjadi modal bagi koperasi untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung perekonomian bangsa yang sejati.

Maka atas nama ekosistem koperasi yang sehat, Hari Koperasi Nasional 2024 harus menjadi titik tolak bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun citra baik koperasi agar kepercayaan untuk berkoperasi meningkat.

Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2021 mengatakan, kerusakan tidak bisa dikembalikan dengan cepat, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki dan memerlukan pengeluaran besar.

Meski begitu tak pernah terlambat kiranya untuk memulai sebuah perbaikan. Maka sinergi memperbaiki citra koperasi menjadi sebuah urgensi. Sebagaimana kita menyadari bahwa aktivitas perekonomian perlu mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Atas nama ekosistem koperasi yang sehat dan berkelanjutan, marilah kita rayakan kehidupan.

Dirgahayu Koperasi Indonesia!

Budi Mustopo

PATEN

PROGRAM ADAPTASI DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

EDISI KETIGA 2024

06

Dukungan KemenKopUKM
Mencapai Visi Indonesia Emas 2045



08

Mengoptimalkan Koperasi sebagai
Lembaga Inkubator

10

Ciptakan Keamanan Berusaha Bagi
UMK melalui Layanan Bantuan dan
Pendampingan Hukum



12

KemenKopUKM Yakin Indonesia
Bisa Jadi Pusat Modest Fesyen

14

KemenKopUKM Rintis Kerja Sama
dengan Austrex dan Kampus
Queensland Wujudkan Ketahanan
Pangan

16

LPDB-KUMKM Tegaskan Komitmen
Salurkan Dana Bergulir untuk
Koperasi di Indonesia

18

Menutup Ruang "TEMU" Lindungi
UMKM Dalam Negeri

20

Koppontren Al-Ittifaq: Berdayakan
Umat dan Ekonomi Masyarakat



22

Aleyah Sintasint Farma: Inovasi
Bisnis Produk Kecantikan

Penanggung Jawab: Arif Rahman Hakim **Redaktur:** Budi Mustopo **Penyunting:** Edi Yanto, M. Maulana, Raymond Tarigan. **Penulis:** Anissa Kusumawanti, Azrul Prayoga, Kiki Andani, Moh. Tomy Dio, Nurul Wulan, RR. Dwitya Suci. **Desain:** Muhammad Ali, Putri Melinda Arsy, Adhiguna. **Fotografer:** Imam Alhushori, Mawan Masturi, Topik, Kurniawan. **Sekretariat:** Nurlailah, Mulyadi, Ali Imron Rasidi, Pradityo Aribowo, Fira Desiana Nasril, Muhammad Kamal.



KOPERASI

MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI MIKRO DAN KECIL

Jeroen Douglas, Direktur Jenderal The International Cooperative Alliance (ICA), awal tahun ini mengatakan, dunia menghadapi begitu banyak tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga kesenjangan sosial, namun koperasi muncul sebagai secercah harapan. Koperasi menunjukkan kemampuan uniknya untuk mendorong pertumbuhan inklusif, kesejahteraan bersama, dan ketahanan masyarakat.

Pernyataannya bukan semata teori di atas kertas, faktanya koperasi asal Prancis Groupe Cr dit Agricole mampu mencatatkan

pendapatan mencapai 117,01 miliar dolar AS pada 2023 di tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu.

Dengan kinerja tersebut, grup perbankan internasional itu terdaftar sebagai koperasi besar nomor satu dunia berdasarkan World Cooperative Monitor 2023 versi ICA dan European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE).

Peritel asal Jerman REWE berada di peringkat kedua dengan pendapatan 82,03 miliar dolar AS dan lembaga keuangan Prancis lainnya, Groupe BPCE meraup pendapatan 64,06 dolar AS, melengkapi posisi tiga

teratas. Tak cuma berfokus pada seberapa besar koperasi tersebut namun koperasi-koperasi itu pun menginformasikan kepada masyarakat tentang begitu besar manfaat yang diperoleh anggotanya.

Fakta itu seperti sekaligus ingin menghapus kesan bahwa koperasi merupakan pelaku ekonomi pinggiran. Sebaliknya, jika ekosistem yang mendukung koperasi dibangun dengan optimal, maka entitas usaha bersama tersebut sudah pasti bertumbuh menjanjikan.

Di Indonesia seiring dengan peringatan Hari Koperasi Nasional, Pemerintah ingin membuktikan



ketangguhan koperasi dalam mengakselerasi ekonomi. Di usia yang ke-77 tahun, koperasi diharapkan mampu menjadi ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, tahun ini Indonesia ingin meneguhkan peran strategis koperasi dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045.

"Pada peringatan ke-77 Tahun Koperasi kali ini, menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran koperasi di Tanah Air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian, khususnya untuk mempercepat ikhtiar kebangsaan keluar dari *middle income trap*," kata MenKopUKM Teten Masduki.

Dengan struktur ekonomi yang gemuk pada posisi usaha mikro, Indonesia memang memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk

menaikkan pendapatan per kapita 5 kali lipat pada 2045 agar dapat menempatkan diri di jajaran negara maju dunia.

Maka di sinilah peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh dari Usaha Mikro ke Usaha kecil; Usaha Kecil ke Usaha Menengah; dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional.

Perubahan Regulasi

Sebagai ekosistem, koperasi memerlukan payung hukum yang mendukung sehingga perubahan regulasi dari UU Perkoperasian yang telah usang ke UU Perkoperasian baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi menekankan pentingnya regulasi baru bagi koperasi Indonesia agar

koperasi mampu menghadirkan ekosistem bisnis yang lebih adaptif bagi pelaku usaha.

Seiring dengan itu, langkah-langkah proaktif terus dilakukan untuk mendorong ekosistem kelembagaan yang lebih sehat bagi koperasi simpan pinjam dan koperasi yang bergerak di sektor riil. "Ekosistem untuk koperasi simpan pinjam, dievaluasi dengan mengintegrasikan beberapa pengawasan yang sebelumnya parsial agar tidak terjadi lagi potensi kontradiksi hasil pengawasan antar sektor. Sistem pengawasan yang kami bangun ini juga transparan dan berbasis digital," katanya.

Aturan itu dirumuskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang di dalamnya juga mengatur pengelompokan klasifikasi koperasi dalam 4 kelompok yaitu K1, K2, K3, dan K4 dengan mendasarkan kategori pada jumlah anggota, modal, dan aset. "Melalui kategori tersebut kami mendapati ada sekitar 887 koperasi yang masuk kategori besar dengan jumlah anggota di atas 9.000 orang, modal di atas Rp15 miliar, dan aset di atas Rp100 miliar hingga triliunan rupiah. Dengan data ini kami melakukan pengawasan sesuai dengan prioritas yang memiliki risiko tinggi," kata Zabadi.

Hal ini dilakukan sebagaiantisipasi dan mitigasi terkait kemungkinan munculnya koperasi bermasalah. Seiring dengan itu, sebagaimana UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), koperasi yang bergerak di bidang keuangan memiliki pilihan untuk mengambil opsi *close loop* (berkegiatan murni simpan pinjam dan hanya melayani anggota) atau *open loop* (berkegiatan jasa

keuangan lainnya dan melayani masyarakat di luar anggota). “Koperasi bebas bergerak di seluruh sektor keuangan termasuk perbankan, investasi, asuransi. Hanya saja koperasi yang bisnisnya akan menjangkau masyarakat umum kita sebut sebagai *open loop* dengan izin dan pengawasannya di bawah OJK. Bentuknya koperasi tapi usahanya perbankan, misalnya,” katanya.

Upaya itu menjadi kesempatan nyata untuk menata kembali koperasi termasuk peluang untuk melakukan purifikasi atau pemurnian koperasi. “Kami persilakan memilih, untuk menjadi koperasi *open loop* atau *close loop*,” katanya.

Sementara di sektor riil, koperasi didorong menjadi *aggregator* yang mewadahi usaha anggotanya agar semakin berdaya saing tinggi sehingga keterbatasan sumber daya bisa diatasi melalui koperasi.

Sebagai contoh, koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak di akses oleh rumah tangga di Indonesia (4,25 persen) setelah Bank Umum selain Kredit Usaha Rakyat atau KUR (4,95 persen).

Bahkan di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayaan usaha. Solusi inilah yang terus ingin diperbesar melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) dengan mematok 100 persen dari pembiayaannya untuk koperasi.

Fondasi inilah yang sedang terus disiapkan melalui pengembangan model korporatisasi dan nelayan berbasis koperasi seperti pembangunan pabrik Minyak Makan Merah per 1.000 hektare sawit milik petani swadaya dan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan

tradisional melalui skema SOLUSI atau Solar untuk Koperasi Nelayan.

Demikian halnya dengan pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) pada 3 tahun terakhir. Rumah Produksi Bersama atau RPB menjadi sentra industri skala menengah (*medium industry*) yang dikelola oleh koperasi untuk mengolah komoditas unggulan ekonomi rakyat agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.

Koperasi telah menjelma menjadi solusi untuk memberikan kepastian pembelian produk, memberikan kepastian terhadap akses inovasi teknologi, memberikan kepastian terhadap akses kemitraan dan bahkan akses permodalan.

Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari cokelat, garam, rotan, bambu, kulit, cabai dan beberapa komoditas unggulan lainnya di sejumlah daerah.

Memang koperasi semakin dituntut memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat kian besar kepada anggota dan lingkungannya sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat.

Sesungguhnya Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak lagi koperasi sektor riil, sektor produktif yang mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil dan menyejahterakan. Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Dirgahayu Koperasi Indonesia! ♦

“

“Pada peringatan ke-77 Tahun Koperasi kali ini, menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran koperasi di Tanah Air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian”



Teten Masduki
MenKopUKM

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN DAN JARING MASUKAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI, UMKM, DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2025-2029



DUKUNGAN KEMENKOPUKM MENCAPAI VISI INDONESIA EMAS

20 45

Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM)

menetapkan enam langkah fokus pengembangan dan mendorong tiga perubahan struktural yang akan menjadi kerangka pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia.

Strategi ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim dan Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan SDM Aparatur, Ruli Nurdina Sari, pada acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan di Ambon.

SesKemenKopUKM menguraikan enam langkah utama yang akan menjadi fokus pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Pertama, pengembangan koperasi sektor produksi dan penguatan pengawasan koperasi. Kedua,

pengembangan kewirausahaan melalui integrasi layanan usaha dan pengembangan wirausaha tematik. Ketiga, peningkatan kapasitas usaha melalui riset, penerapan teknologi, inkubasi usaha dan sertifikasi usaha.

"Fokus lainnya, peningkatan akses dan inovasi pembiayaan usaha, lalu fasilitasi akses pemasaran dan kemitraan UMKM yang terhubung dengan rantai pasok industri. Terakhir, pemanfaatan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) koperasi dan UMKM," kata SesKemenKopUKM.

Arif juga menekankan pentingnya arah kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045. Kebijakan ini mencakup perluasan jaringan pasar domestik dan global, penguatan kontribusi pada rantai nilai industri, serta akselerasi digitalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, penciptaan wirausaha berorientasi pertumbuhan inklusif, dan penguatan resiliensi usaha.

Perluasan akses dan pengembangan inovasi dalam pembiayaan usaha yang juga menjadi prioritas karena terkait penggunaan teknologi digital, pengembangan produk

pembiayaan inovatif, serta alternatif penilaian dan penjaminan kredit.

Di antara target utama yang diharapkan tercapai pada tahun 2045 adalah rasio volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 10%, proporsi jumlah UKM sebesar 5%, dan rasio kewirausahaan sebesar 8%.

Di tempat yang sama, Ruli Nurdina Sari menjelaskan tiga perubahan struktural yang perlu dilakukan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Pertama, penciptaan tenaga kerja melalui perubahan struktur pelaku usaha dengan korporatisasi dan hilirisasi UMKM berbasis komoditas unggulan.

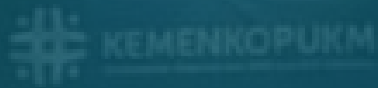
Kedua, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan digital untuk meningkatkan nilai tambah bagi koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan pengetahuan, informasi, dan modal intelektual.

Ketiga, meningkatkan jumlah wirausaha di sektor pertanian dan perikanan. Mengingat rendahnya proporsi pemuda di sektor pertanian, perlu adanya gerakan untuk mempopulerkan sektor

pertanian dan perikanan di kalangan anak muda guna mempercepat perkembangan sektor riil.

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan yang diselenggarakan di Ambon ini menghasilkan panduan strategis yang komprehensif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Berfokus pada transformasi digital, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan peran sektor pertanian dan perikanan, diharapkan koperasi dan UMKM dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. ♦

Arif Rahman Hakim
SesKemenKopUKM



PENGUATAN USAHA KOPERASI MELALUI LEMBAGA INKUBATOR 2024

25 - 28 JUNI 2024

KAB. PASURUAN & KAB. MALANG, JAWA TIMUR

Ahlihan Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional

Koperasi Modern, KUMKM Kelas, Indonesia Maju

0000

Mengoptimalkan Koperasi sebagai Lembaga Inkubator

Sebuah langkah strategis diambil oleh Kementerian Koperasi dan

UKM (KemenKopUKM) untuk memperkuat koperasi di Indonesia. Berkolaborasi dengan PT Greenlite Kreasi Abadi dan U-Coach Indonesia, KemenKopUKM menggelar pelatihan bagi pengurus dan pengelola Koperasi Agro Niaga Jabung di Malang dan Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar di Pasuruan, Jawa Timur. Pelatihan yang digelar di Malang, Jawa Timur pada 25-28 Juni 2024 tersebut bertujuan untuk memperkuat koperasi agar menjadi lembaga inkubator bisnis.

Kolaborasi ini juga mendukung program koperasi modern dan UMKM Naik Kelas. Selain itu, eksistensi koperasi yang semakin kuat dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggota koperasi serta masyarakat, karena koperasi sektor riil juga bisa melayani masyarakat non-anggota.

Koperasi yang diinkubasi akan memiliki fungsi tambahan sebagai klinik konsultasi bisnis dan pendampingan terhadap *tenant-tenant* anggota koperasi dan UMKM secara umum. Selanjutnya, pelatihan bagi pengurus dan pengelola koperasi ini digelar secara luring dan daring, dengan pendampingan intensif selama tiga bulan. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis tetapi juga dukungan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan koperasi dalam menjalankan fungsi inkubator bisnis. Ke depan, fungsi koperasi akan bertambah, yaitu menjadi klinik konsultasi bisnis dan pendampingan terhadap kios-kios anggota koperasi dan UMKM secara umum.

Program penguatan koperasi menjadi lembaga inkubator ini diharapkan dapat meningkatkan

volume usaha, jumlah anggota, dan bisnis anggota koperasi. Selain itu, citra pemberitaan positif terhadap institusi koperasi akan semakin mengemuka, profesionalisme, dan tata kelola koperasi akan meningkat. Satu tahun ke depan diharapkan melalui program penguatan koperasi ini dapat diukur tingkat keberhasilan dengan menyajikan data sebelum dan sesudah. Di mana, dengan data keberhasilan tersebut, maka program inkubator ini dapat direplikasi ke koperasi-koperasi lain.

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan untuk membina 10 koperasi menjadi inkubator bisnis pada 2024. Inkubator bisnis merupakan program atau lembaga yang menawarkan bimbingan, pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi pengusaha pemula dan UMKM.

Beberapa koperasi yang terpilih untuk mengikuti program ini antara lain Koperasi Agro Niaga Jabung, Malang, Jawa Timur; KPSP Setia Kawan Nangkojajar, Pasuruan, Jawa Timur; Koperasi Petani Indonesia, Tuban, Jawa Timur; Koperasi Tani Hijau Makmur, Tanggamus, Lampung; KPSU Solok Radjo, Solok, Sumatera Barat. Selain itu, Koppontren Darul Mursyid di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara; Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di OKU Timur, Sumatra Selatan; Koperasi Kopi Wanita Gayo di Bener Meriah, Aceh; KSU Gardu Tani Al-Barokah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; dan Koperasi Kospermindo di Makassar, Sulawesi Selatan, juga turut serta dalam program ini.

Dengan adanya program inkubator ini, diharapkan koperasi di Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi yang kuat dan profesional akan menjadi



Program penguatan koperasi menjadi lembaga inkubator ini diharapkan dapat meningkatkan volume usaha, jumlah anggota, dan bisnis anggota koperasi.

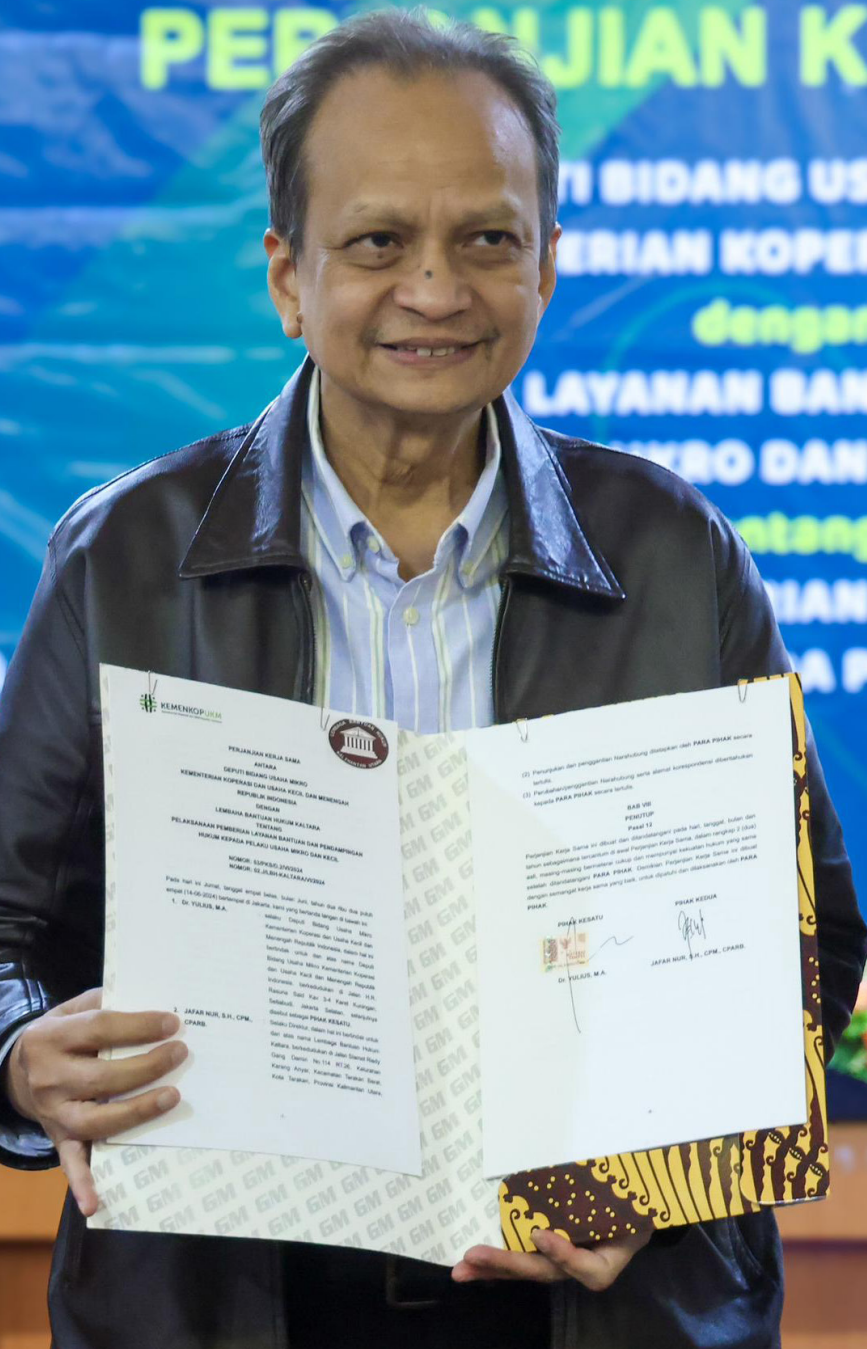
motor penggerak bagi wirausaha baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan model koperasi modern yang dapat menjadi contoh bagi koperasi lain di seluruh Indonesia.

Melalui kolaborasi antara KemenKopUKM, PT Greenlite Kreasi Abadi, dan U-Coach Indonesia, ini merupakan langkah nyata menuju transformasi ekonomi berbasis koperasi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. ♦

PENANDATANGANNAN PERJANJIAN KERJASAMA

DI BIDANG USAHA MIKRO
 BERKOPERASI DAN BERKAWAL
 DENGAN
 LAYANAN BANTUAN HUKUM

UMK DAN KECIL (UMK & KECIL)
 MELALUI LAYANAN BANTUAN HUKUM



Ciptakan Keamanan Berusaha Bagi UMK melalui Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum



Permasalahan hukum masih menjadi isu yang rentan terjadi pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dipicu oleh berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha mereka, mulai dari perizinan usaha, pembiayaan, ketenagakerjaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi satu hal yang krusial untuk didapatkan oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Mitra Layanan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (LBH-UMK) tentang pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan bantuan, serta pendampingan hukum kepada pelaku UMK.

Penandatanganan kerja sama dilakukan dengan 9 mitra LBH-UMK di 9 kabupaten/kota. Sebelumnya, kerja sama telah berjalan dengan 17 mitra LBH-UMK di 12 daerah.

"Secara keseluruhan, Unit Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil, telah dapat diwujudkan sebanyak 26 unit LBH-

UMK di daerah," kata Deputy Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara KemenKopUKM dengan Mitra LBH-UMK di Jakarta, Jumat (14/6).

Menurut Yulius, langkah tersebut dilakukan sesuai amanat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan tersebut mengamanatkan agar Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Sebagai upaya mewujudkan amanat kebijakan tersebut, KemenKopUKM telah menyiapkan program layanan bantuan dan pendampingan hukum dengan mengambil langkah-langkah yang strategis. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagai mitra, antara lain dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Firma Hukum, dan perguruan tinggi baik di pusat maupun daerah.

"Tujuannya, agar program dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat besar bagi pengembangan usaha mikro dan kecil," kata Yulius.

Selain membangun kerja sama, Yulius mengungkapkan upaya lain yang diperlukan adalah meningkatkan koordinasi dengan

instansi/lembaga yang membidangi urusan usaha mikro dan kecil di daerah agar terjalin hubungan kerja sama yang harmonis antara instansi/lembaga tersebut dengan mitra LBH-UMK.

Yulius berharap, instansi/ lembaga yang membidangi urusan usaha mikro dan kecil dan mitra LBH-UMK di berbagai daerah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Ngawi, Kota Surakarta, Kota Bitung, dan Kota Tarakan, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dapat segera melakukan koordinasi untuk mengimplementasikannya.

"Dengan begitu, bisa segera terwujud layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada usaha mikro dan kecil dengan baik dan optimal," kata Yulius.

Melalui kerja sama ini, Yulius berharap agar pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada usaha mikro dan kecil ini dapat memberikan bimbingan, literasi, dan motivasi yang positif untuk perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah kerja masing-masing mitra LBH-UMK.

"Terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan sehingga pelanggaran hukum oleh pelaku usaha mikro dan kecil dapat diminimalisir, serta kepastian dan perlindungan hukum dapat terjamin," kata Yulius.



KemenKopUKM Yakin Indonesia Bisa Jadi Pusat Modest Fesyen

Menurut data BPS, Indonesia berada pada ranking 13 dunia untuk ekspor *modest* fesyen di tahun 2021 senilai 4,68 miliar dolar AS. Kontribusi ekspor sektor *modest* fesyen baru 3,5 persen terhadap nilai total ekspor non-migas di Indonesia.

Potensi industri *modest* fesyen dunia diproyeksikan mencapai USD 375 miliar pada 2025 dengan rata-rata pertumbuhan 6 persen setiap tahunnya. Lima negara produsen terbesar untuk *modest* fesyen adalah China, India, Turki, Italia,

dan Vietnam dengan pangsa pasar mencapai 76 persen di seluruh dunia.

Dalam rangka mendukung percepatan Indonesia sebagai pusat *modest* fesyen dunia, dilakukan gerakan nasional kolaboratif, salah satunya melalui "Deklarasi Bulan *Modest* Fesyen". Gerakan nasional ini merupakan upaya meningkatkan *exposure* industri *modest* fesyen Indonesia, serta menjadi landasan semua pihak dalam memberikan dukungan penuh atas inisiatif tersebut.

Inisiasi Kementerian Koperasi

dan UKM (KemenKopUKM) untuk mencanangkan Deklarasi Bulan *Modest* Fesyen ini didasarkan pada potensi besar Indonesia yang memiliki populasi muslim lebih dari 229 juta orang dengan konsumsi industri *modest* fesyen terbesar ketiga di dunia.

"Deklarasi Bulan *Modest* Fesyen ini merupakan langkah pertama yang menunjukkan komitmen semua pihak dalam mendukung inisiatif ini, dan diharapkan dapat menjadi ujung tombak glorifikasi dan akselerasi gerakan dalam mendukung visi Indonesia sebagai pusat *modest* fesyen dunia," kata

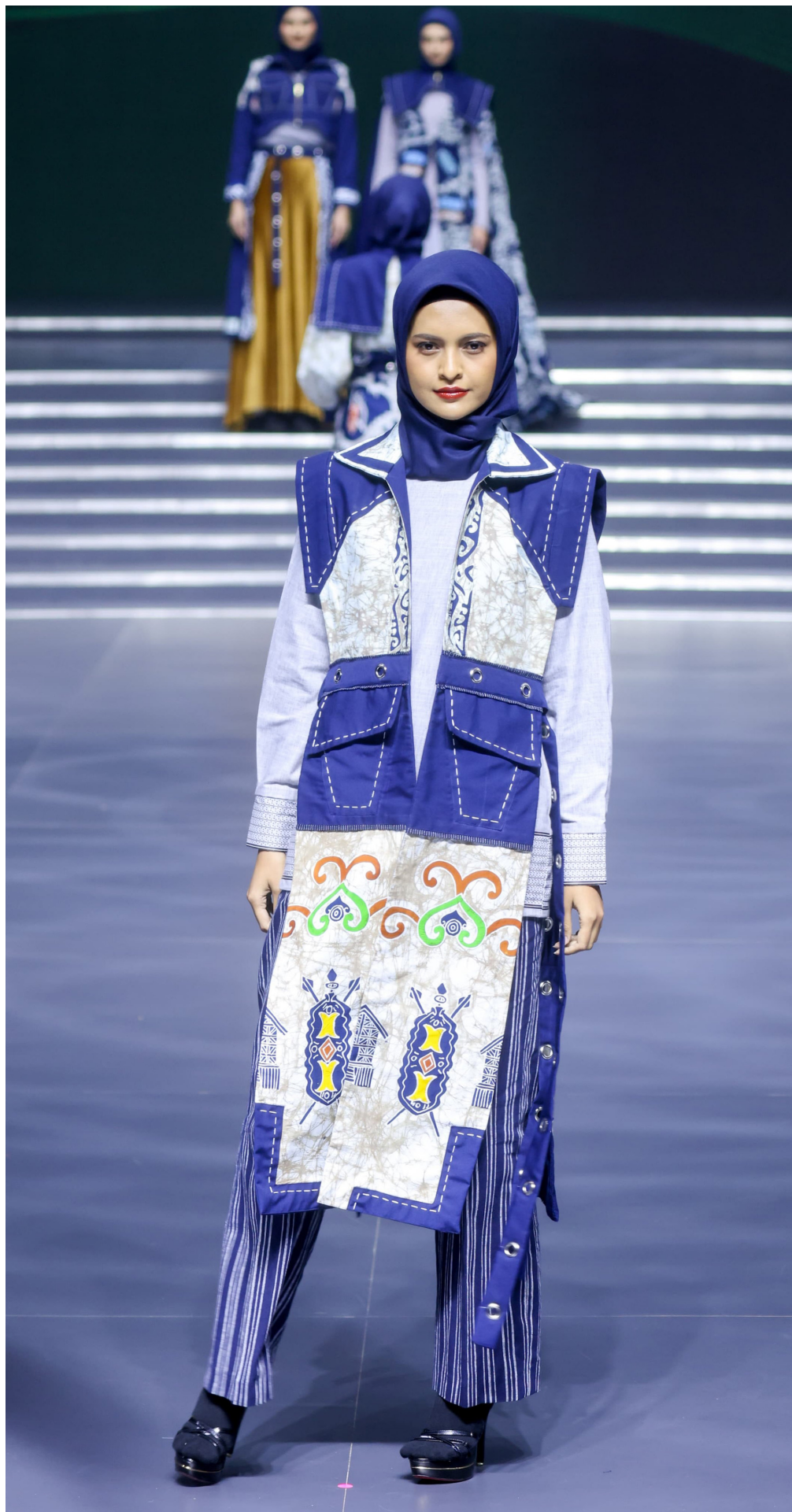
Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar KemenKopUKM Fixy.

Temu Nasional Deklarasi Bulan *Modest* Fesyen menghasilkan sembilan poin penting, diantaranya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, perumusan kebijakan dan regulasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, promosi internasional, dukungan penelitian dan pengembangan, perancangan desain kreatif, perumusan standarisasi, pemasaran dan promosi, serta publikasi.

Selain itu, dalam upaya memperkuat dan mendorong inisiatif tersebut KemenKopUKM bersama Bank Indonesia (BI) memproduksi *reality show modest* fesyen pertama di Indonesia dan di dunia yang bernama IN2THENEXT. Inisiatif ini didukung oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Indonesian Fashion Chamber (IFC).

"Kami mendukung perkembangan industri *modest* fesyen Indonesia untuk menjadi pusat *modest* fesyen dunia dan optimis produk fesyen dari dalam negeri bisa bersaing dengan industri fesyen dunia," kata Fixy.

Program IN2THENEXT tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, tapi juga menjadi wadah *branding modest* fesyen dalam negeri. Melalui acara ini, KemenKopUKM berharap akan muncul desainer *modest* fesyen berbakat yang memanfaatkan kekayaan wastra Indonesia dari empat Provinsi Pariwisata Ramah Muslim Indonesia, yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. ◆





**KemenKopUKM Rintis
Kerja Sama dengan Austrex
dan Kampus Queensland
Wujudkan Ketahanan Pangan**



Sektor agrikultur di Indonesia memiliki potensi besar dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari sisi sumber daya manusia, Indonesia memiliki jumlah petani milenial mencapai 6,1 juta orang atau 21,93 persen dari total petani. Produksi pertanian Indonesia pun terus meningkat dan bahkan menjadi eksportir pertanian dengan kenaikan 5,32 persen per tahun.

Potensi besar ini menjadi modal utama Indonesia mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih lagi, pemerintah terus melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor agrikultur.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan berbagai terobosan inovatif yang bertujuan menciptakan lebih banyak wirausaha yang berdaya saing di sektor agrikultur. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja sama dengan pebisnis maupun institusi

pendidikan di luar negeri.

Baru-baru ini, KemenKopUKM menjajaki kemitraan dengan Austrex dan Queensland University of Technology di Australia. Ini merupakan langkah strategis mengingat Austrex sebagai perusahaan peternakan yang sudah merambah secara global ke berbagai negara termasuk Rusia, China, Amerika Serikat, Uruguay, Turki, Indonesia dan Selandia Baru.

“Kerja sama dengan Austrex diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi tata kelola usaha atau industri peternakan di Indonesia,” kata Deputy Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah dalam kunjungannya ke Australia belum lama ini.

Siti Azizah mengatakan sektor peternakan berperan besar bagi terwujudnya program ketahanan pangan baik di lingkungan global atau bagi Indonesia. Sektor ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar keberlangsungan dan keberlanjutan usaha/industri peternakan tetap dapat terjaga dengan baik.

Sejumlah pelaku usaha yang turut menyertai kunjungan tersebut diharapkan dapat belajar

dari pengalaman Austrex dan mengadopsi tata kelola bisnis yang diterapkan untuk dikembangkan di Indonesia.

Austrex dikenal sebagai perusahaan peternakan yang terbukti memiliki pola kerja sama dan pengelolaan hubungan dengan peternak yang dilakukan dengan sangat baik dan berkelanjutan.

Terkait kerja sama dengan Queensland University of Technology, diharapkan dapat mengembangkan ekosistem bisnis dan kewirausahaan di Indonesia, khususnya dalam peningkatan kapasitas usaha sektor agribisnis.

“Diharapkan kemitraan dapat memperkuat langkah strategis kerja sama dengan Queensland University of Technology dan mitra-mitra lainnya di Queensland, Australia,” kata Siti Azizah.

Siti Azizah berharap sinergi dan kerja sama dengan Austrex dan Queensland University of Technology dapat dilakukan di masa mendatang sehingga target membangun ketahanan pangan dan peningkatan rasio kewirausahaan nasional dapat tercapai. ♦



LPDB-KUMKM TEGASKAN KOMITMEN SALURKAN DANA BERGULIR UNTUK KOPERASI DI INDONESIA

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) kembali menegaskan komitmennya dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di Indonesia.

"LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi

di Indonesia sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Supomo Direktur Utama LPDB-KUMKM dalam keterangan resminya.

Komitmen ini adalah bagian dari upaya LPDB-KUMKM untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air, yang menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.

Supomo menjelaskan bahwa

LPDB-KUMKM menyediakan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan tarif layanan yang terjangkau dan proses yang mudah.

Lebih lanjut, Supomo menyampaikan bahwa pengajuan proposal pinjaman atau pembiayaan di LPDB-KUMKM tidak dipungut biaya. Koperasi dapat mengajukan proposalnya secara *online* melalui e.proposal.lpdb.id.

"Pengajuan proposal *online* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dalam mengakses layanan LPDB-KUMKM," jelas Supomo.

Menurut Supomo, pengajuan dana bergulir di LPDB-KUMKM gratis dan dapat dilakukan secara *online*. Ini adalah upaya LPDB-KUMKM untuk memastikan proses yang lebih cepat, akuntabel, dan transparan.

"Kami berharap dengan kemudahan ini, koperasi di seluruh Indonesia dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang," harap Supomo.

Supomo juga menghimbau kepada koperasi agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan LPDB-KUMKM dan memberikan iming-iming

tertentu dengan imbalan agar pengurusan proposal pinjaman dipermudah.

"LPDB-KUMKM tidak pernah menunjuk perantara atau calo dalam proses penyaluran dana bergulir," tegas Supomo.

Supomo menegaskan bahwa dalam menyalurkan dana bergulir, LPDB-KUMKM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

"Dana yang disalurkan LPDB-KUMKM adalah milik negara yang harus terus digulirkan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi yang sehat, taat aturan maupun regulasi, dan memiliki usaha yang baik," kata Supomo.

Supomo menambahkan, dana bergulir telah digunakan untuk mendukung berbagai sektor

usaha, mulai dari pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga perdagangan.

"Dampak positif dari program ini telah dirasakan oleh banyak pihak, baik secara langsung oleh koperasi penerima maupun secara tidak langsung oleh masyarakat luas melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, koperasi dan UMKM Indonesia dapat tumbuh dan bersaing. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dan memastikan bahwa dana bergulir yang kami salurkan benar-benar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Supomo. ♦



Seiring makin tingginya minat terhadap kosmetika dan *skin care* di tanah air, melahirkan peluang bisnis yang sangat besar. Tentu saja, ini menjadi ceruk pasar bagi pertumbuhan industri produk kecantikan lokal.

Bahkan, banyak orang yang kemudian ingin menjajal bisnis produk kecantikan, namun terkendala pengalaman di bidang bisnis atau tidak ingin direpotkan dengan proses produksi, termasuk riset produk dan segala bentuk perizinan. Mereka ini yang kemudian menyasar perusahaan jasa maklon produk kecantikan. Lewat perusahaan jasa maklon akan membantu proses pembuatan produk hingga siap jual.

Aleyah Sintasint Farma

Inovasi Bisnis Produk Kecantikan

Salah satu perusahaan jasa maklon produk kecantikan itu adalah PT Aleyah Sintasint Farma. Perusahaan yang berbasis di Yogyakarta ini berhasil menjejakkan bisnis produk kecantikan di tanah air.

Berdiri sejak 2017, PT Aleyah Sintasint Farma sebelumnya bernama CV Cantik Jelita. Perubahan nama ini dilakukan karena kapasitas perusahaan semakin besar. Mau tidak mau, perusahaan harus melakukan ekspansi agar dapat menampung permintaan yang kian meninggi.

Wisnu, *Plan Manager* PT Aleyah Sintasint Farma, mengatakan konsep perusahaan maklon adalah membebaskan pelanggan untuk membuat mereknya sendiri agar produk-produk yang ingin dibuat sesuai dengan ekspektasi pelanggannya.

"Itu sebabnya, maklon bisa disebut dengan *private label* atau 3PM atau *third party manufacturing* yang artinya adalah *create your own mind*," kata Wisnu.

Wisnu mengatakan terhadap semua

produk yang ingin dihasilkan oleh setiap pelanggan, selalu melalui proses diskusi antara pelanggan dengan mereka. Selanjutnya diikuti dengan menghasilkan produk contoh sesuai ekspektasi pelanggan.

Cukup mudah untuk memulai sebuah *order* di Aleyah Sintasint Farma. Pelanggan dapat memberikan *benchmarking product*, atau membuat semacam *sample* yang kemudian diajukan ke PT Aleyah Sintasint Farma.

"Kemudian dilakukan rekomposisi yang paling sesuai dan mendekati produk yang diinginkan pelanggan. Setelahnya, pelanggan akan memberikan *feedback*, sampai dengan produk contoh tersebut sesuai dengan keinginan dan dilanjutkan ke tahap produksi," jelas Wisnu.

Wisnu menyebutkan Aleyah Sintasint Farma sebagai *one stop solution* karena terjadi proses dari hulu ke hilir. Ia mengatakan pihaknya membantu siapa saja yang ingin menghasilkan produk kecantikan dengan mereknya sendiri dengan formula efektif, sampai pada *packaging* dan *delivery*.

Wisnu juga mengatakan pihaknya juga tidak ragu untuk membuat *Minimum Order Quantity* (MOQ) bagi pelanggan yang memiliki keterbatasan modal awal.

Aleyah Sintasint Farma dapat membantu menjembatani dalam pengurusan regulasi maupun registrasi yang dipersyaratkan pemerintah.

"Terkait dengan BPOM, sertifikat halal, dan lain-lainnya kami bisa bantu. Kami juga terus meningkatkan *services, research and innovation*. Kami tidak berhenti dalam satu sesi dengan *customer* saja, tapi kita juga terus berinovasi dengan melibatkan *supplier* kami," kata Wisnu.

Berbagai inovasi dilakukan Aleyah Sintasint Farma untuk terus meningkatkan *benchmarking* sehingga dapat berkompetisi dengan pasar dalam negeri dan luar negeri. Perusahaan terus menjangkau jejaring pasar di luar negeri mulai dari Korea, Jepang, hingga China untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Inovasi juga dilakukan dengan terus mempelajari tren pasar, menerima banyak masukan atau *insight* dari para pelanggan, mengembangkan *research* untuk menggali potensi-potensi yang ada, dan membuat *packaging* semenarik mungkin.

"*Packaging* adalah *first impression* ketika *customer* melihatnya. Jadi tidak melulu bicara tentang formula tapi juga kita bicara tentang sebuah *packaging* yang efektif," kata Wisnu.

PT Aleyah Sintasint Farma yang sudah memiliki lebih dari 200 *stock keeping unit* (SKU) ini, juga telah memiliki *brand* yang berorientasi pada retail *offline store* seperti KKV, yaitu *brighty* dan *iswhite*.





Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Berdayakan Umat dan Ekonomi Masyarakat

Mengusung visi mengaji dan bertani, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dikenal dengan Kopontren Alif, di Jawa Barat berhasil memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat khususnya para petani di daerah tersebut.

Kopontren Alif kini sukses mengambil peran menjadi *offtaker*, menyerap 100% hasil pertanian sesuai kebutuhan pasar dengan menghubungkan para petani dengan pasar modern, seperti Superindo, AEON hingga Yogya Dept Store.

Didirikan oleh K.H Fuad Affandi, Kopontren Alif yang dulu hanya dikenal sebagai tempat belajar dan mengaji, kini berubah 180 derajat. Fuad Affandilah sosok inspiratif pesantren yang berhasil mengubah wajah Kopontren sebagai tempat

belajar ilmu agama sekaligus menjadi tempat lahirnya jiwa-jiwa wirausaha baru.

Kopontren Alif menggeluti usahanya dengan sangat serius sehingga mampu menyalurkan hasil pertanian 70 ton per hari dari 130 hektar lahan pertanian yang dulunya tidak produktif.

Kesuksesan Kopontren Alif dalam menjalankan usahanya di sektor agrikultur membuat koperasi tersebut memiliki aset senilai Rp49 miliar. Koperasi ini memiliki lebih dari 1.200 anggota hingga berjejaring dengan 90 pondok pesantren yang tersebar di beberapa daerah lain di Indonesia.

Bahkan, Presiden Joko Widodo pun dibuat takjub saat kunjungannya ke Kopontren Alif pada 6 Maret 2023. Presiden mengapresiasi model bisnis yang dijalankan oleh Koperasi Alif.

“Perencanaan yang dilakukan

di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan *role model*, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal di fotokopi saja,” kata Presiden.

Presiden pun juga mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk mengadopsi model bisnis yang diterapkan Ponpes Al-Ittifaq dalam mengelola hasil pertanian. Menurut Presiden, Al-Ittifaq juga dapat dijadikan induk dalam bisnis pertanian.

“Dari Solo Raya fotokopi, dari Riau fotokopi, dari Jawa Timur fotokopi, dari Lampung fotokopi, induknya, *holding*-nya sementara Al-Ittifaq,” ungkap Presiden.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyebutkan Kopontren Alif sebagai contoh sukses korporatisasi pangan dapat memajukan perekonomian desa dan ekonomi umat.

"Melalui konsep tersebut, tidak akan ada lagi petani yang teriak tidak terserap produknya karena koperasi yang menyerap. Jadi, petani dan peternak tidak pusing untuk memasarkan produknya karena koperasi yang akan menjadi pasar sekaligus pengolahnya," kata Menteri Teten.

Chief Financial Officer Kopontren Alif, Irvan Sadikin menceritakan Kopontren Alif menjadi rumah bagi para petani dalam menjalankan usahanya.

"Petani yang tergabung dalam Kopontren Alif secara tidak langsung sudah merasakan nikmatnya berada di dalam ekosistem korporatisasi pangan. Jadi petani tidak akan bingung menjual hasilnya panennya ke mana. Mereka melakukan budidaya hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Irvan Sadikin.

Irvan juga menuturkan pihaknya juga dalam melakukan pola tanam menggunakan teknologi *smart farming* yang diadopsi dari PUM Belanda dan Koperasi Jepang

"Kita diajarkan bagaimana manajemen perkerjasama dan

pengelolaan bertani. Baru-baru ini kita diajarkan bagaimana cara membuat silabus oleh teman-teman ahli Belanda dari Wageningen University untuk pengembangan tata cara bertani ke depan," ucap Irvan.

Ia juga menambahkan, sebagai koperasi yang diberikan label *role model* di sektor pertanian oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pihaknya tak segan untuk mentransfer ilmu pengetahuan tentang model bisnis dan tata cara pertanian kepada koperasi lainnya.

"Kami mendirikan lembaga inkubator Alif Learning Center (ALEC). Lembaga inkubator pertama yang berbadan hukum koperasi yang memiliki karakteristik bisnis usaha bidang pertanian dan mendukung *core* bisnis koperasi," papar Irvan.

Lewat Lembaga inkubator ALEC, kata Irvan, koperasi dapat belajar dan harapannya nanti dapat mereplikasi pengalaman Kopontren Alif sehingga dapat terbentuk ekosistem korporatisasi pangan.

"Kopontren Alif akan menjaring

petani dan koperasi yang kecil-kecil tergabung dalam satu ekosistem, sehingga memiliki daya saing dan memperluas akses pasar. Koperasi dan petani yang tadinya tidak memiliki nilai ekonomi, menjadi memiliki nilai ekonomi dan kepastian pasar," kata Irvan.

Irvan juga menjelaskan rencana besar Kopontren Alif ke depan dalam menjalankan usahanya. Pertama, memperluas kebutuhan pasar yang disesuaikan dengan potensi Kopontren Alif, kedua turut membantu koperasi lain dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa, ketiga membantu memasarkan produk di masing-masing koperasi, keempat berkomitmen meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lewat lembaga inkubator ALEC, dan kelima mengembangkan digitalisasi di Kopontren Alif.

"Semua rencana itu untuk memajukan koperasi Indonesia agar naik kelas, dan lebih berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global serta menjadi rumah untuk masyarakat Indonesia," tegas Irvan. ♦





Menutup Ruang “**TEMU**” Lindungi UMKM Dalam Negeri

Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki ramai diperbincangkan atas ketegasannya menolak kemungkinan masuknya *platform e-commerce* asal China bernama TEMU.

Kehadiran TEMU jika dibiarkan disinyalir dapat menimbulkan berbagai ancaman dan kerugian bagi UMKM di tanah air. Pasalnya, *platform* yang merupakan bagian dari raksasa *e-commerce* asal Tiongkok, Pinduoduo ini menerapkan model *direct to consumer* (D2C). Artinya, produk dijual dan dikirim langsung dari pabrik yang berlokasi di China kepada konsumen.

Mengamini hal tersebut, Direktur Utama SMESCO Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan keberadaan TEMU akan memberikan ancaman serius bagi UMKM dalam negeri. Hal tersebut menurutnya sudah terbukti dengan keberadaan TEMU di 58 negara yang mematok harga produk-produknya dengan terlalu murah.

"Indonesia negara yang sangat besar dengan 260 juta penduduk, akses internet juga sampai ke pedesaan, jangan sampai itu dimanfaatkan *platform* luar. Oleh karena itu, dari pada nunggu gede baru kita bahas, mending mulai dari sekarang kita cegah," kata Wientor dalam keterangannya.

Menurut Wientor, sebagai *platform* yang menerapkan transaksi secara langsung dari manufaktur ke konsumen, tidak ada rantai nilai dan proses distribusi yang diberikan oleh TEMU. Menurutnya, bahkan sekarang sudah terdapat sekitar 80 ribu pabrik di China yang terdaftar.

"Kalau satu pabrik menghasilkan 100 *Stock Keeping Unit* (SKU) saja sudah ada 8 juta produk yang siap masuk Indonesia, dengan harga

murah dan secara *crossborder*. Jadi bisa dibayangkan TEMU adalah pembunuh massal UMKM kita. UMKM kita tidak bisa jualan karena semua produknya *full* dari China dan kita tidak punya kesempatan berpartisipasi," ungkap Wientor.

Wientor menambahkan, TEMU memiliki *budget* yang cukup besar untuk dikenal luas. Salah satunya dilakukan dengan beriklan pada Super Bowl, pertandingan final sepak bola Amerika yang memiliki *audience* sangat besar.

"Mereka bisa ngasih harga 0 rupiah, asumsinya produk yang dikeluarkan adalah produk *dead stock* yang menumpuk di pabrik di China dan dibuang ke negara lain," ujar Wientor.

Di negara besar yang sudah berkembang, Wientor beranggapan negara tidak punya kewajiban melindungi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, dengan jumlah UMKM sebanyak 64 juta, apabila *platform* luar dibiarkan masuk begitu saja maka UMKM lokal tidak akan bisa bersaing. Apalagi menurutnya ke depan akan Lebih banyak lagi *platform* luar negeri yang masuk ke Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi sasaran pasar yang sangat empuk bagi negara lain.

Wientor berpesan agar kita bisa belajar dari kasus TikTok Shop beberapa waktu lalu. Meskipun teknologi tidak dapat dibendung, namun ia tidak bisa dibiarkan begitu saja apabila berpotensi menjadi pembunuh massal UMKM dalam negeri.

"Kalau teknologi itu bisa diperlambat masuk ke negara kita sambil menyiapkan UMKM kita, kenapa tidak lakukan itu? Kita ngomongin 64 juta UMKM, soko guru ekonomi, pahlawan negara, dan tulang punggung ekonomi," kata Wientor.

Selain itu, Wientor juga mengingatkan para pelaku

UMKM agar tidak lagi bergantung pada satu *platform* tertentu. Ia menyarankan pelaku UMKM di tanah air mulai menyadari pentingnya memiliki *website* atau *landing page* sendiri.

"Untuk itu, kita kemarin dibantu sama Google dan YouTube, mereka ngasih dana hibah Rp2 miliar kepada UKM agar mereka punya *website* atau *landing page* sendiri. Ini penting karena ketika orang membeli lewat *landing page*-nya dia, itu berarti tidak ada biaya administrasi 12%, artinya profit UKM jauh lebih gede," ucap Wientor.

Hal tersebut sekaligus menjadi wujud keseriusan SMESCO dalam mendorong UMKM untuk *onboarding*, di mana sebanyak 1200 UMKM telah diberikan pendampingan untuk pembuatan *landing page domain* dan *hosting* di 18 titik, melalui kerja sama dengan Google dan YouTube.

Menurut Wientor, saat ini SMESCO memiliki tiga mandat, pertama adalah menjadi *Center of Excellence*, yakni banyak membantu UMKM baik dari sisi produk dan usahanya agar naik kelas, hingga pendampingan serta inkubasi.

"Kedua, kita menjadi sayap dagang karena sebagai Badan Layanan Umum harus *generate revenue*, bagaimana caranya kita menjualkan produk UMKM baik secara *online* maupun *offline*," tutur Wientor.

Sedangkan pada mandat terakhir, SMESCO diproyeksikan untuk bisa membangun *startup hub*. Saat ini Indonesia memiliki 2562 *startup*, dengan 500 di antaranya telah *docking* di KemenKopUKM.

"Mereka akan dikasih kesempatan untuk ngantor, *networking*, hingga diberikan kesempatan untuk *pitching*, kita bikin *conference startup* di SMESCO," ungkap Wientor. ♦



Saksikan Inspirasi Penting hanya di

